



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 perlu diubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 155 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 TAHUN 2019-2023

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | PENJELASAN FORMULASI | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-------------------------------|--------|---|--|
| MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau | | | | | |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Tahun | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Dinas Kesehatan |
| 2 | Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan | Dinas Pendidikan |
| 3 | Terwujudnya Penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | Persentase Penduduk Miskin | Persen | $\% \text{ penduduk miskin} = \frac{(\text{Jumlah Penduduk Miskin})}{(\text{Total Jumlah penduduk})} \times 100$ | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Indeks Pembangunan Gender | Poin | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|--|
| MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan | | | | | |
| 4 | Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | hasil survei terhadap variabel persepsi, sikap dan kerjasama umat beragama | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal | | | | | |
| 5 | Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | $Pertumbuhan\ Ekonomi/PDRB = (PDRB\ (t+1)-PDRB\ (t))/(PDRB\ (t))$ | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 6 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | $(Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik)/(Panjang\ seluruh\ jalan\ Kabupaten) \times 100\%$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Rasio Jaringan Irigasi | Persen | $Rasio\ Jaringan\ Irigasi = (Panjang\ saluran\ irigasi)/(Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian)$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | poin | $IKLH = (30\% \times IK\ air) + (30\% \times IK\ udara) + (40\% \times IK\ tutupan\ lahan)$ | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | Indeks Risiko Bencana | Poin | $RB = tingkat\ ancaman \times (tingkat\ kerentanan\ kawasan\ yg\ terancam) / (tingkat\ kapasitas\ kawasan\ yang\ terancam)$ | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat | | | | | |
| 8 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | Opini BPK | Opini | Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen manajemen kinerja | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | Penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen (komponen pengungkit dan hasil) | Sekretariat Daerah |
| 9 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | $SKM = (total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur) / (total\ unsur\ yang\ terisi) \times nilai\ penimbang$ | Sekretariat Daerah |
| MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang | | | | | |
| 10 | Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing | Pengeluaran Per Kapita | Rp (juta) | $(Total\ pengeluaran\ Rumah\ tangga) / (Jumlah\ Rumah\ Tangga)$ | Sekretariat Daerah |
| 11 | Menciptakan wirausaha dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja x 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Jumlah Wirausaha (UMKM) | UMKM | data jumlah UMKM | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019-2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---|------------|---|------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai LPPD Kabupaten | Angka | Hasil Penilaian Propinsi atau pusat terhadap Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 | Sekretariat Daerah |
| 2 | | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | Hasil akumulasi presentasi jawaban perkomponen sesuai Peratururan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 | Sekretariat Daerah dan Inspektorat |
| 3 | | Indeks RB | Point | Hasil Akumulasi presentasi jawaban per komponen sesuai permenpan 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah | Sekretariat Daerah dan Inspektorat |
| 4 | | Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik | Persentase | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ | Sekretariat daerah |

2. Sekretariat Dewan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|--|------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persen | $\frac{\text{Jumlah fasilitasi dukungan kegiatan tugas dan fungsi DPRD}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD</p> | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan |

3. Inspektorat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|--|----------|---|-------------|
| 1 | Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang | Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | $= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah menerapkan SPIP}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 55 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian <i>Self assessment</i> (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern). Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indikator Opini BPK</p> | INSPEKTORAT |
| 2 | | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" | Persen | $= \frac{\sum SAKIP \text{ OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 – 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indek</p> | INSPEKTORAT |
| 3 | | Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM | Kategori | IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal melalui langkah evolusi kecil yang disusun menjadi lima level kapabilitas progresif, yaitu: Level 1 : Initial, Level 2 : Infrastructure, Level 3 : Integrated, Level 4 : Managed, Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal yang bersangkutan. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, menunjukkan semakin meningkatnya ukuran, kompleksitas maupun risiko organisasi. Pada masing-masing level kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit internal, yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajemen SDM; Praktik profesional; Manajemen kinerja dan akuntabilitas; Hubungan dan budaya organisasi; Struktur tata kelola. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. | INSPEKTORAT |

| | | | | | |
|---|--|---|--------|--|-------------|
| 4 | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Persen | $= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencaangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang mendukung pada IKU RPMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi</p> | INSPEKTORAT |
| 5 | | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | Persen | $= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.</p> | INSPEKTORAT |
| 6 | | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD | Persen | $= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}} \times 100\%$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD yang material hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP. Yang mendukung pada IKU RPJMD yaitu Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</p> | INSPEKTORAT |

4. Dinas Pendidikan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|--|--|
| 1 | Meningkatnya Mutu dan aksebilitas pelayanan pendidikan dasar (SD-SMP) | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 2 | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 3 | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 Th}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 4 | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 5 | | Persentase Guru yang Bersertifikasi | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 Th}} \times 100\%$ | Permendikbud Nomor 19 tahun 2019 |
| 6 | | Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik | Persen | $\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas yang Baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas Keseluruhan}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 7 | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD) | | $\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 8 | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP) | | $\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 9 | Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | APK PAUD | Persen | $\frac{\text{Jumlah Guru SD}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 10 | | Persentase PAUD yang terakreditasi | Persen | $\frac{\text{Jumlah PAUD yang sudah terakreditasi}}{\text{Jumlah PAUD}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 |
| 11 | | Angka partisipasi kasar kesetaraan | Persen | $\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7-12 Th, 13-15 Th, 16-18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 |
| 12 | | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah | Persen | $\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 3-6 Th yg mengikuti wajib diniyah}}{\text{Jumlah siswa kelas 3 s.d.jenjang SD}} \times 100\%$ | Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 |

5. Dinas Kesehatan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---|--------|---|--|
| 1 | Meningkatkan Akses, Cakupan dan Mutu Layanan Kesehatan | Jumlah Kematian Ibu | Jiwa | Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu | Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi |
| 2 | | Jumlah Kematian Bayi | Jiwa | Jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu | Laporan seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi |
| 3 | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan | Poin | $\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ | Laporan seksi mutu pelayanan |
| 4 | | Persentase Balita Stunting | Persen | $\frac{\text{Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Semua Balita di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ | Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi |
| 5 | | Prevalensi HIV/AIDS | Persen | $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-49 th yang positif HIV}}{\text{Penduduk usia 15-49 th}} \times 100\%$ | Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| 6 | | Angka Kesakitan Penyakit Menular | Angka | $\frac{\text{Jumlah kasus baru (diwakili Inciden rate DBD,HIV TB)}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100.000$ | Laporan Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular |
| 7 | | Universal Healht Coverage | Persen | $\frac{\text{Jumlah penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$ | Laporan seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan |
| 8 | | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Poin | $\frac{\text{Jumlah Indikator bernilai 1 (jawaban Y)}}{12 \text{ indikator} - \Sigma N \text{ (jawaban Not applicated)}}$ | Laporan seksi Pelayanan Kesehatan Primer |

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|--|--------|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | $= \frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang jalan Kabupaten}} \times 100 \%$ | Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023 |
| 2 | Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi | Rasio jaringan irigasi | Persen | $= \frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100 \%$ | Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023 |
| 3 | Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang | Persen | $= \frac{\text{Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang}}{\text{RTRW dan RDTR}} \times 100$ | Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023 |
| 4 | Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi | Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi | Persen | $= \frac{\text{Jumlah target prosentase dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah target prosentase dalam akhir Periode}} \times 100 + \text{Jumlah target tahun sebelumnya}$ | Dinas PUPR, RPJMD KAB. SUMEDANG TAHUN 2018-2023 |

7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---|--------|---|--|
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | Jumlah Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Seluruh Rumah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2 | | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh | Persen | Jumlah Luas Permukiman Kumuh terhadap Jumlah Luas Permukiman dan Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 3 | | Persentase Rumah Tangga berakses air minum | Persen | Jumlah Rumah Tangga yang Berakses terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 4 | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 5 | | Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata | Persen | Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata terhadap Jumlah Bangunan dan Lingkungan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6 | Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | Persen | Jumlah Kasus Sengketa terhadap Jumlah KK yang Tertangani | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 7 | | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | Jumlah Bidang Tanah yang di Bebasan terhadap Jumlah Rencana Luas Tanah yang akan Dibebaskan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|--|--------|---|------------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persen | Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi jumlah penduduk dikali 100% | DINSOS-P3A |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | Jumlah Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan P2TP2A dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100% | DINSOS-P3A |
| 3 | | Kabupaten Layak Anak | Skor | Skor Yang Diperoleh | DINSOS-P3A |
| 4 | | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya | Persen | Jumlah Pekka yang sudah mandiri dibagi Jumlah Pekka dikali 100% | DINSOS-P3A |

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|--|--------|---|-------------------------------------|
| 1 | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | $\frac{JUMLAH\ PENGANGGUR}{ANGKATAN\ KERJA} \times 100$ | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 2 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | $\frac{KASUS\ YANG\ DISELESAIKAN}{KASUS\ YANG\ TERDAFTAR\ KEDISNAKER} \times 100$ | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 3 | Meningkatnya Penempatan Transmigrasi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | KK | Jumlah Kuota Transmigran yang di tempatkan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|-------------------------------|--------|--|--|
| 1 | Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan | Persentase penanganan sampah | persen | $\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ ditangani\ (ton/Tahun)}{Jumlah\ Timbulan\ Sampah\ (Ton/Tahun)} \times 100\%$ | Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan |
| 2 | | Persentase pengurangan sampah | persen | $\frac{Jumlah\ Sampah\ yang\ berkurang\ disumber\ sampah\ (ton/tahun)}{Jumlah\ timbulan\ sampah\ (ton/tahun)} \times 100\%$ | Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Persampahan dan Pertamanan |
| 3 | | Persentase RTH Terkelola | Persen | $\frac{Luas\ RTH\ Publik\ yang\ dikelola\ (Ha)}{Luas\ RTH\ Publik\ (Ha)} \times 100\%$ | Laporan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bidang Persampahan dan Pertamanan |
| 4 | Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | $IKA = 100 - \left(\frac{\sum Sample\ IPA > 1}{\sum Sampel} \times 100 \right)$ Merupakan Status mutu air yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan | Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Air Sungai Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Penataan dan Pnaatan Hukum Lingkungan |
| 5 | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ Merupakan indek mutu udara ambien yaitu keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. | Laporan Pengendalian dan Pengujian Kualitas Udara Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------|---|---|
| 6 | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | $ITV = 100 - \left[\{84,3 - (TV \times 100)\} \times \frac{50}{54,3} \right]$ LUAS TUTUPAN VEGETASI (LTV) = data kawasan hutan + data luasan hutan hak + data luasan VEGETASI hasil perhitungan/interpretasi (RTH,dll) | Laporan Aktivitas Peningkatan Tutupan Lahan Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Kehutanan |
|---|--|--------------------------------------|------|---|---|

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|---|---|
| 1 | Percepatan Penertiban Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | Poin | $\frac{\text{Total nilai per Unsur}}{\text{Total nilai yang Terisi}} \times 100\%$ | Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 |
| 2 | | Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah}}$ | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 3 | | Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran | Persen | $\frac{\text{Jumlah Bayi ber Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi Lahir}}$ | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 4 | | Persentase Data Ganda dan Anomali | Persen | $\frac{\text{Jumlah Data ganda dan Anomali}}{\text{Jumlah Data Penduduk}}$ | Data Kependudukan Bersih (DKB) Dirjen Dukcapil Kemendagri |

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---|--------|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Desa | Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang | Persen | $\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang dan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}} \times 100\%$ | DPMD Bidang Pemerintahan Desa |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Persen | $\frac{\text{Jumlah BUMDes Maju dan Berkembang}}{\text{Jumlah BUMDes Yang Aktif}} \times 100\%$ | DPMD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Penerapan Siskudes | Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal | Persen | $\frac{\text{Penerapan Siskudes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ | DPMD Bidang Keuangan dan Aset Desa |

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|-----------------------------------|--------|--|--------|
| 1 | Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui KB | Total Fertility rate (TFR) | Angka | $\frac{5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i}{ASFR_i}$ | DPPKB |
| 2 | Meningkatkan Kemandirian Keluarga Peserta KB | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | Persen | $\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$ | DPPKB |
| 3 | | Persentase Keluarga Sejahtera 1 | Persen | $\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera 1}}{\text{Jumlah Total Keluarga}} \times 100\%$ | DPPKB |

14. Dinas Perhubungan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|--|--------------------|--|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persen | Jumlah dokumen, Jumlah ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, jumlah ketersediaan PJU, Jumlah terminal; /dermaga | Dinas Perhubungan |
| 2 | Meningkatnya Sistem Transportasi yang dapat mendukung Mobilitas masyarakat | Cakupan Trayek Angkutan Umum | Persen | $\frac{\text{Jumlah trayek yang registrasi pada tahun } n}{\text{Jumlah Ijin trayek yang ada}} \times 100$ | Dinas Perhubungan |
| 3 | | Rata - rata Peningkatan Penumpang Angkutan Umum | orang/hari | $\frac{\text{Jumlah penumpang per hari}}{\text{Kapasitas angkutan umum penumpang (Alokasi Angkot/Angdes)}} \times 100$ | Dinas Perhubungan |
| 4 | | Persentase Kendaraan Laik Jalan | Persen | Jumlah Kir Per tahun | Dinas Perhubungan |
| 5 | Terciptanya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Lalu Lintas bagi para pengguna jalan | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas | Jumlah Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Per tahun | Dinas Perhubungan |
| 6 | | Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP) | Persen | Jumlah Satuan Ruas Parkir (SRP) | Dinas Perhubungan |

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|--|--------|--|---|
| 1 | Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik | Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi | Persen | $\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$ | Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 |
| 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | Poin | Penjumlahan dari Setiap Nilai Indikator yang dihitung X nilai tingkat kematangan dan bobot indikator | Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan | Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | Persen | $\frac{\text{Jumlah Data Yang Akurat}}{\text{Jumlah Data Yang Harus Ada}} \times 100\%$ | Hasil Rumusan Bersama Antara Dinas dengan Bappppeda |
| 4 | | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memiliki sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah keseluruhan OPD}} \times 100\%$ | Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah |

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|--|--------|--|---|
| 1 | Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perdagangan | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | persen | Jumlah subsektor perdagangan besar dan eceran (n) : Jumlah PDRB Tahun n) | Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang |
| 2 | | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | persen | Jumlah subsektor industri pengolahan (n) : Jumlah PDRB Tahun n) | Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang dan BPS Kab. Sumedang |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|--------|---|---|
| 3 | Mengoptimalkan Peran Koperasi | Cakupan Koperasi Aktif | persen | Jumlah Koperasi Aktif (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n) | Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Wirausahawan | Jumlah UMKM | UMKM | Jumlah UMKM Tahun (n) | Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Sumedang |

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---|--------|---|----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp) | Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang | LKPM |
| 2 | | Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | Poin | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan | DPMPPTSP |

18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|--|--------|---|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | Persen | $\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ | Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga | Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat Nasional | Orang | Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional | Bidang Pemuda dan Olahraga |
| 3 | Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah | Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan | Persen | $\frac{\text{Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dibina}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$ | Bidang Kebudayaan |
| 4 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang | Bidang Pariwisata |
| 5 | Mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional | Persen | $\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ | Bidang Ekonomi Kreatif |

19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|---|-------------------------------|
| 1 | Peningkatan Pemahaman atas pentingnya arsip dalam pelaksanaan pemerintahan daerah | Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan | Orang | Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Mengukur Jumlah Kunjungan ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang | Kegiatan Layanan Perpustakaan |
| 2 | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan | Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling | Persen | $\frac{\text{Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Lokasi yang terlayani melalui pusling dengan jumlah desa di kabupaten sumedang | Kegiatan Layanan Perpustakaan |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|---|------------------------------------|
| 3 | Peningkatan Jumlah Koleksi Pustaka sesuai dengan minat masyarakat | Tingkat kepuasan pengunjung | Persen | Jumlah Kepuasan pengunjung Mengukur Jumlah kepuasan pengunjung melalui Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) | SKM (standar Kepuasan Masyarakat) |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang}} \times 100\%$ Mengukur Jumlah Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya | Kegiatan Pembinaan Kearsipan |

20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor : | | | |
| | | a. Tanaman Pangan | Persen | $Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman pangan pada tahun sebelumnya | Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang |
| | | B. Tanaman Hortikultura | Persen | $Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman hortikultura PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman hortikultura pada tahun sebelumnya | Badan Pusat Statistik |
| | c. Tanaman Perkebunan | Persen | $Gt = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman perkebunan PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada suatu tahun PDRB = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman perkebunan pada tahun sebelumnya | Badan Pusat Statistik | |
| 2 | Menjamin Ketahanan Pangan Daerah | Sektor Pola Pangan Harapan (PPH) | persen | $PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing - masing kelompok pangan}$ Pola Pangan Harapan adalah susunan panga yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. | Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik |

21. Dinas Perikanan dan Peternakan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---------------------------------------|--------|--|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan dan Peternakan | Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | Persen | $\frac{((PDRB \text{ ADHK perikanan tahun } n - PDRB \text{ ADHK perikanan } (n-1)) / PDRB \text{ ADHK perikanan tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$ | BPS Kab. Sumedang |
| 2 | | Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan | persen | $\frac{((PDRB \text{ ADHK peternakan tahun } n - PDRB \text{ ADHK perikanan } (n-1)) / PDRB \text{ ADHK peternakan tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$ | BPS Kab. Sumedang |

22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|--|--------|---|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD | Persen | $\frac{\text{Jumlah Sasaran Renstra Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RPJMD yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$ | RPJMD dan RENSTRA |
| 2 | | Tingkat Kesesuaian RKPd terhadap RPJMD | Persen | $\frac{\text{Jumlah Sasaran RKPd Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RPJMD yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$ | RPJMD dan RKPd |
| 3 | | Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPd | Persen | $\frac{\text{Jumlah Sasaran Renja Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran RKPd yang harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$ | RKPd dan RENSTRA |
| 4 | | Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik" | Persen | melihat fakta hasil pembangunan yg dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian | RPJMD |
| 5 | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan } (n)}{\text{Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan } (n-1)} \times 100\%$ | DOKUMEN PENELITIAN dan DPA |

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|----------------------------|--------|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, Disiplin ASN dan Pelayanan Kepegawaian yang Bersih dan Melayani | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | Hasil dari aplikasi (situs) DJSAN yang diinput oleh BKPSDM | BKN |
| 2 | | Indeks Sistem Merit ASN | Poin | Hasil dari Aplikasi (situs) SIPINTER yang diinput oleh BKPSDM | KASN |

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|-------------------------|--------|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Opini BPK | Opini | Penjelasan : Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Formulasi : Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | BPKAD |
| 2 | | APBD Tepat Waktu | Status | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | BPKAD |

25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|--|---|---|--------|---|--|
| 1 | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan dengan Target 17.03 % | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang |
| Formulasi : $\frac{\text{Realisasi Asli Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$ | | | | | |
| 2 | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah | Poin | Penjelasan : Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 85 Poin Formulasi : Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang |

26. Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|--|--|--------|--|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tibumtranmas | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | Persen | $\frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Persen | $\frac{\text{Pelanggaran K-3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K-3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundang - Undangan Daerah | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | Persen | $\frac{\text{Penyelesaian Pelanggaran Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | Persen | $\frac{\sum \text{Luas WMK (Luas Lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5 | | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | $\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\%$ | Satuan Polisi Pamong Praja |

27. Rumah Sakit Umum Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|--|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B | Persen | $\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$ | RSUD Kabupaten Sumedang |
| 2 | | IKM Rumah Sakit | poin | Nilai Indeks X Nilai Dasar | RSUD Kabupaten Sumedang |
| 3 | | Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit | Persen | $\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$ | RSUD Kabupaten Sumedang |

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|-------------------------|--------|--|--------|
| 1 | Pengurangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang | Indeks Resiko Bencana | Poin | Penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana Formulasi : Risiko (R) = Bahaya (H) x $\frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$ | BPBD |

29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|---|------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Negara Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat | Indeks kerukunan umat beragama | Persen | SURVEI Index Kerukunan Umat Beragama | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | Persen | $100 / 100 + (\text{jumlah konflik}) \times 100\%$ | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Tingkat Partisipasi dalam Mendukung Proses Demokrasi | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | Persen | $(\text{Jumlah suara sah} + \text{Suara Tidak sah}) \times 100\%$ | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | | Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif | Persen | $\text{jumlah ormas} / \text{jumlah ormas aktif} \times 100\%$ | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

30. Kecamatan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan Formulasi | Sumber |
|----|---|---|--------|--|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017) | Kecamatan |
| 2 | | Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2) | KK | Jumlah Rumah Tangga Miskin Desil 1 dan 2 yang keluar dari data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | Kecamatan |
| 3 | | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal | Persen | Jumlah Desa yang menggunakan 4 Menu Siskeudes (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan) dibagi Jumlah Desa dikali 100 Persen | Kecamatan |
| 4 | | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dibagi Jumlah Bencana dikali 100 Persen | Kecamatan |
| 5 | | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | Jumlah SPPT PBB yang dibayar dibagi jumlah SPPT PBB dikali 100 Persen | Kecamatan |

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR